

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah penggajian merupakan masalah manajemen kepegawaian yang paling kompleks dan merupakan suatu aspek yang penting dalam setiap instansi pemerintah maupun perusahaan. Setiap instansi selalu membutuhkan faktor tenaga kerja manusia untuk jalannya suatu instansi tersebut, begitu juga dengan tenaga kerjanya, yang sangat membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gaji merupakan suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan atau pegawai atas jasa dan hasil kerjanya, Oleh karena itu gaji merupakan unsur yang penting bagi perusahaan maupun instansi pemerintahan.

Gaji mempunyai arti penting bagi pegawai sebagai individu. Pegawai akan merasa puas apabila gaji yang diterima sesuai dengan keahlian dan jabatannya, sehingga dapat mendorong pegawai untuk bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan keahliannya.

Sistem penggajian pegawai negeri sipil diatur dalam undang-undang no 43 tentang kepegawaian. Gaji pokok pegawai negeri sipil ditetapkan dalam golongan berdasarkan pangkat yang dimiliki. Kenaikan pangkat diikuti dengan kenaikan gaji secara otomatis tidak berdasarkan prestasi pegawai yang bersangkutan. Dengan demikian tidak ada korelasi antara gaji dengan beban tugas dan tanggung jawab.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan salah satu unit SKPD yang bergerak dalam sektor pertanian khususnya tanaman pangan terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya diseluruh Indonesia. Balas jasa yang biasa diberikan untuk kinerja pegawai yaitu berupa gaji. Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran gaji pegawai negeri sipil secara umum pada instansi pemerintah khususnya pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, sehingga penulis meneliti dan membahasnya dalam tugas akhir dengan judul “ SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana sistem dan prosedur pembayaran gaji pegawai pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem dan prosedur pembayaran gaji pegawai pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan antara lain :

1. Menambah pengetahuan dan menambah wawasan tentang sistem dan prosedur pembayaran gaji pegawai pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.
2. Menciptakan dan mengembangkan rasa kedisiplinan dan tanggung jawab.
3. Meningkatkan kemampuan untuk bersosialisasi dengan dunia kerja yang sebenarnya.

1.5 Cara Memperoleh Data

Dalam pengamatan ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi menurut Arikunto (2006:24), observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke tempat yang akan diteliti. Penulis melakukan pengamatan mengenai sistem dan prosedur pembayaran gaji pegawai pada dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan provinsi Sumatera Barat yang dimulai pada tanggal 14 januari s/d 14 maret 2019. Pengamatan terhadap sistem dan prosedur pembayaran gaji pegawai untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur yang digunakan dalam pembayaran gaji pegawai.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu mencari, mengumpulkan dan mempelajari bahan baca berupa buku teks dan bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis bahas.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Menguraikan apa saja teori yang berhubungan dengan Sistem dan Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

BAB III : Gambaran umum Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Menguraikan tentang gambaran umum Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang mencakup sejarah dan perkembangan, ruang lingkup, dan bentuk-bentuk kegiatan serta susunan organisasinya.

BAB IV : Pembahasan

Sistem dan Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pada pemahaman teori serta membandingkan dengan apa yang telah diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.

